

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH  
FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN  
2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**  
**11720715201**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR”*** yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD DAVIN RAYMOND


NIM : 11720715201

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk di uji kan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Dr. H. Abu Samah, M.H.**  
NIK. 130 217 087



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**  
 NIM : 11720715201  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Rudiadi, SH., MH**

Penguji I  
**Muslim, S. Ag, SH, M. Hum**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam proses pembangunan. Begitu juga dengan organisasi kemahasiswaan yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri (*soft skills*). Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan organisasi kemasyarakatan membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar tidak terlaksana dalam melaporkan kegiatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar tidak terlaksana dalam melaporkan kegiatannya. Adapun faktor penghambatnya adalah (i) Kurangnya Tingkat Kesadaran Organisasi; (ii) serta Kurangnya Sosialisasi oleh Kesbangpol Kabupaten Kampar



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar pada program Strata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kesbangpol Kabupaten Kampar”**.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda H. Akmal dan Ibunda Husna Yeni serta ketiga saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. H. Abu SamahM.H.. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Budi Azwar, S.E., M.Ec. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Rafli Bastian, Hafizan Akbar, M. Asraf Pratama, Rahmat Hartono yang telah berjuang bersama dari awal kuliah hingga menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 14 April 2021

Penulis,

**MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**  
**NIM : 11720715201**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. BatasanMasalah.....	17
C. RumusanMasalah .....	17
D. TujuanPenelitian Dan ManfaatPenelitian .....	18
E. MetodePenelitian.....	19
F. SistematikaPenulisan.....	24
<b>BAB II TNJAUAN UMUM</b>	
A. Sejarah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar .....	26
B. Visi dan Misi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar....	46
C. StrukturOrganisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Kampar.....	47
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Organisasi Kemasyarakatan .....	48
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....	48
2. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan.....	50
3. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan .....	51
B. Pemerintah Daerah.....	51
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	51
2. Asas Penyelenggaran Pemerintah Daearh.....	55
C. Teori Demokrasi.....	57





## BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kesbangpol Kabupaten Kampar .....	71
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kesbangpol Kabupaten Kampar.....	77

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	23
Table II.1 Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten Kampar .....	47



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem tatanan kemerdekaan berserikat yang ada di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan ini mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum Perubahan Kedua pada Tahun 2000 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dibentuk dengan semangat untuk menyatukan berbagai jenis bentuk berserikat dan berkumpul dengan mengatur semua jenis Ormas dengan berbagai jenis dan bidang kegiatan dalam satu pengaturan, namun masih banyak terdapat kelemahan dalam penerapannya. Definisi Organisasi Kemasyarakatan yang diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 yaitu, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa.<sup>3</sup>

Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis

---

<sup>3</sup> Mohammad Mulyadi, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi Vol. 3 No. 2, (2012), hlm.168



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi masyarakat dapat berbentuk dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.<sup>5</sup>

Dalam terminologi Negara merupakan hasil konstruksi konseptual suatu organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atau kedaulatan dalam sebuah wilayah, penduduk dan pemerintahan<sup>6</sup>. Negara hadir karena adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat menjamin seluruh hak dari seluruh elemen Negara. Indonesia sejak awal kemerdekaan menyatakan diri yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, *Problematisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat* Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, *Mulawarman Law Rev.* Volume 4 Issue 1, (2019), hlm. 1

<sup>6</sup> Nurul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*. (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia.<sup>7</sup>

Hukum dalam arti luas merupakan keseluruhan aturan normatif yang menjadi pembatas berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didukung dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya<sup>8</sup>. Dalam Pendapat lain Hukum secara luas memiliki pengertian segala fenomena sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat<sup>9</sup>. Fenomena yang terjadi dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan bentuk-bentuk aturan secara sendirinya yang mana aturan tersebut merupakan aturan Normatif. Aturan Normatif dalam kehidupan bernegara akan timbul dari lembaga-lembaga pemangku kekuasaan negara yang diberikan wewenang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tentukan dalam sistem organisasi kekuasaan.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: ,2016), hlm 4

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011),hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin maju kehidupan masyarakat dalam sebuah negara maka semakin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap berkehidupan keteraturan melahirkan sistem keorganisasian yang makin berkembang menjadi semacam organizational imperative. Pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan meningkatkan kecenderungan masyarakat dalam keaktifan di keorganisasian yang teratur.

Cicero mengatakan bahwa dalam pola keorganisasian yang teratur maka dengan sendirinya akan menghadirkan mekanisme sendiri yang berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian akan menjadikan masyarakat lebih terorganisasi. Tetapi juga dengan berkembang pesatnya pertumbuhan masyarakat maka akan menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum juga semakin tinggi, baik dari segi kuantitas hukum maupun kualitas hukum tersebut.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintahan Daerah yang berwenang mengatur kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Organisasi Masyarakat dapat dibubarkan jika melanggar:

1. Melakukan tindakan permusuhan
2. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Menganut, mengembangkan, serta meyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa mekanisme pembentukan Ormas<sup>13</sup>:

Ormas didirikan oleh 3 orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan yayasan.

Kemudian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa:

1. Ormas dapat berbentuk Badan:

- a. Badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

2. Ormas dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota

Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa:

1. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk:

- a. Perkumpulan; atau
- b. Yayasan

2. Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota

3. Ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Organisasi Kemsyarakatan mengatur bahwa:

1. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Akta pendirian yang dikelarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. Program Kerja
  - c. Sumber pendanaan
  - d. Surat keterangan domisili
  - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam dalam perkara di Pengadilan.
2. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia
3. Pengesahan sebagai badan hukum dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Organisasi Kemsyarakatan mengatur bahwa mekanisme pemberhentian Ormas:

1. Ormas dilarang
  - a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
  - b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menggunakan dengan upaya izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang atau benbera Ormas;
  - d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
  - e. Menggunkan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
2. Ormas dilarang
- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan;
  - b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
  - c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
  - e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ormas dilarang
- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Mengumpulkan dana untuk partai politik

4. Ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

Kemasyarakatan mengatur bahwa:

“Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”

Selanjutnya Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa:

Sanksi administratif terdiri atas;

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian bantuan dan/atau hibah
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur bahwa pembubaran Ormas:

1. Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat
2. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
3. Putusan pembubaran Ormas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintahan Daerah yang berwenang mengatur kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa<sup>14</sup>:

“Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota”.

Kemudian Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa:

Laporan kegiatan organisasi tersebut meliputi:

1. Nama dan jenis kegiatan
2. Tempat dan waktu kegiatan; dan
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan,terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>15</sup>

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik

---

<sup>15</sup> Catur Wibowo dkk, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, (2015), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.<sup>16</sup>

Organisasi masyarakat (ormas) atau dalam istilah lainnya sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan Ormas tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.<sup>17</sup>

Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagisegenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan

<sup>16</sup> Denny Zainuddin, *Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7 No. 1, (2016), hlm. 13

<sup>17</sup> I Ganjar Herdiansah, dkk, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas.<sup>18</sup>

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri (*soft skills*). Kemampuan diri (*soft skills*) penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, kemampuan diri (*soft skills*) dikenal dengan istilah kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*). Keterampilan kewarganegaraan dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Mahasiswa sebagai pelaku utama dan *agent of exchange* dalam gerakan-gerakan pembaharuan memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual yang memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang

---

<sup>18</sup>Mohammad Mulyadi, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 3, No. 2, (2012), hlm. 168

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab, dan dewasa. Secara moril mahasiswa akan dituntut tanggung jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan lingkungan. Oleh karena itu, A.M Fatwa dalam Syam menyatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa karena mahasiswa merupakan sumber kekuatan moral (*moral force*) bagi bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) memiliki beberapa indikator, seperti yang dikemukakan oleh White yaitu berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan bersama, melakukan aksi untuk merubah sistem politik, pemantauan acara-acara publik dan masalah-masalah dalam masyarakat, menerapkan putusan kebijakan tentang masalah-masalah dalam masyarakat, berunding dan membuat keputusan tentang masalah-masalah masyarakat, dan mempengaruhi para pembuat putusan kebijakan tentang masalah-masalah masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki *civic skills* dengan menerapkan indikator yang dikemukakan oleh White tersebut. Hal tersebut memberikan nilai positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam kancah pembangunan bangsa.<sup>20</sup>

Di era global banyak sekali muncul berbagai tantangan dan ancaman yang sifatnya tidak terduga, tuntutan mahasiswa di era inipun memunculkan berbagai perubahan dan dinamika. Mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika di pendidikan tinggi yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan yang sifatnya rutinitas. Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan mampu menjadi *agent of*

<sup>19</sup>Kosasih, *Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, (2016), hlm. 64

<sup>20</sup>*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*change* dan *social control* terhadap lingkungan maupun daerah serta negaranya. Mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas akademika di pendidikan tinggi di dalamnya memiliki intelektual yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang akademisi saja tapi juga intelektual pemikiran dan wawasan yang harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap bagian negeri ini.<sup>21</sup>

Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut. Ada 4 (empat) peran penting mahasiswa yang merupakan harapan dari masyarakat yakni peran sebagai agent of change, social control, iron stock dan moral force. Peran tersebut tentu saja untuk tidak diartikan sebagai peran berat ataupun disalah artikan yang pada ujungnya masyarakat antipati dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa.

Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap kritis mahasiswa sering membuat sebuah perubahan besar dan membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah dan cemas. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan termasuk di dalamnya organisasi mahasiswa, Pemerintahan Daerah yang berwenang mengatur kegiatan

<sup>21</sup>Suroto, *Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2, (2016), hlm. 1040

<sup>22</sup>Habib Cahyono, *Peran Mahasiswa Di Masyarakat*, De Banten-Bode, Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa:

“Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota”.

Kemudian Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa:<sup>23</sup>

Laporan kegiatan organisasi tersebut meliputi:

1. Nama dan jenis kegiatan
2. Tempat dan waktu kegiatan; dan
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Namun dalam pelaksanaannya Forum mahasiswa Kampar Kiri Hulu adalah salah satu organisasi yang tidak melaporkan kegiatan organisasinya kepada Kesatuan Bangsa dan Politik Kampar baik nama dan jenis kegiatannya, maupun tempat dan waktu kegiatan. Padahal jika organisasi tersebut melaporkan kegiatannya maka Kesatuan Bangsa dan Politik bisa melakukan pembinaan, pengawasan serta pemantauan terhadap organisasi tersebut.

---

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui lebih lanjut pelaporan kegiatan oleh organisasi di Kesbangpol maka penulis tertarik mengkaji **“Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kesbangpol Kabupaten Kampar”**

### **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu di Kesbangpol Kabupaten Kampar?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
  - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017



Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

3. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>24</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara

---

<sup>24</sup>Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) jilid 1, hlm.1.

yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>25</sup>

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian lapangan/sosiologis yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

## 2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspe-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan terhadap Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 24

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.175

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampardengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kesbangpol Kabupaten Kampar. Alasan penulis mengambil penelitian disini karena melihat permasalahan yang ada di Kesbangpol Kabupaten Kampar terhadap Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm.176

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

##### b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

##### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>28</sup>

##### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>29</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive*

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hlm.122

<sup>29</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), hlm,155



*sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel

**Tabel 1.1**

**Tabel populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kampar	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2.	Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kampar	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
3.	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
4.	Ketua Umum Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
5.	Sekretaris Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
	Jumlah	5 orang	5 orang		

c. Study Kepustakaan

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal dan lain-lain.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep organisasi masyarakat, konsep Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, serta teori demokrasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimanakah Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar, serta faktor penghambat Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu di Kesbangpol Kabupaten Kampar.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar

Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kampar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar yang mengurus bidang kesatuan bangsa politik. Visi dan Misi Kabupaten Kampar yang mengarah khususnya pada peningkatan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, program dan kegiatan yang disusun difokuskan kepada pemantapan wawasan kebangsaan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, pembinaan ORMAS dan LSM serta penanganan konflik.

Badan Kesatuan Bangsa Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas di bidang Kesatuan Bangsa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.<sup>30</sup>

Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

##### a. Tugas Pokok

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi :

<sup>30</sup>Profil Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan;
  - b. Melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
  - c. Monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, sesuai standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang ditetapkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku politik.
2. Sekretaris, mempunyai tugas :
- a. Penyusunan Program
 

Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.
  - b. Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan.
 

Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : Urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.
  - c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka sinkronisasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kabupaten Kampar.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar;
- d. Membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar;
- e. Mengkoordinir dan membuat usulan rencana program dan kegiatan di unit kerja untuk diteruskan ke BAPPEDA;
- f. Mempersiapkan laporan tahunan program dan kegiatan unit kerja;
- g. Mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan program dan kegiatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
    - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  2. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
    - a. Menerima, mengagendakan, memproses surat masuk dan menata kearsipan;
    - b. Menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan mengirimnya;
    - c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - d. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
    - e. Mengkoordinir operasional perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - f. Melaksanakan Dokumentasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - g. Melaksanakan penegakan disiplin pegawai;
    - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
    - i. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan melayani tamu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - j. Mengkoordinir SPT dan SPPD;
    - k. Mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas; dan
    - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengolahan dan pembayaran gaji, penghailan pegawai lainnya, kegiatan rutin kantor dan kegiatan langsung;
  - c. Menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
  - d. Mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung;
  - e. Memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara dan pembantu bendahara kegiatan langsung;
  - f. Mengkoordinir rencana keperluan, perlengkapan dan fasilitasi rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
1. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, meliputi :
    - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Kampar.
    - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Kampar.
    - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Kampar.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten Kampar.
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter Bangsa di wilayah Kabupaten/kota
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Kampar.
- g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah Kabupaten Kampar.
- h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila di wilayah Kabupaten Kampar.
- i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah Kabupaten Kampar.
- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Kampar.
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah Kabupaten Kampar.
- l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten Kabupaten Kampar.
- n. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Kampar.
- o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Kampar.
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Kampar.
- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah Kabupaten Kampar.

2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
  - c. Melakukan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
  - d. Melakukan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan, dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
  - f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;
  - g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;
  - h. Melakukan perumusan kebijakan, pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
  - i. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah, dan
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Sub Bidang Bidang Karakter Bangsa, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK);
  - c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pemantauan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
- e. Melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi ideologi, pebauran dan kewarganegaraan;
- f. Melakukan penyiapan analisis kondisi pemahaman masyarakat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan ideologi, pembauran dan kewarganegaraan;
- g. Memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/pengungsi/pendatang di lingkungan masyarakat Kabupaten Kampar;
- h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan;
- i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
- j. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan ketahanan ideologi dan pebauran dan kewarganegaraan; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- b. pemetaan ituasi, kondisi, dan usur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pacasila diwilayah Kabupaten Kampar.
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- e. fasilitas peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- f. pelaksanaan dan fasilitas pendidikan politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- g. fasilitas peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- h. penyusunan data dan informasi partai politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- i. fasilitas peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik diwilayah Kabupaten Kampar.
- k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- l. failitas penanganan masalah dinamika politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- m. fasilitas pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik dalam negeri sebagai badan hukum diwilayah Kabupaten Kampar.
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden diwilayah Kabupaten Kampar.
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah diwilayah Kabupaten Kampar.
- p. pemantauan perkembangan politik dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi lembaga politik;
  - c. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi partai politik di Kabupaten Kampar;
  - d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memfasilitasi penyebaran peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris partai politik;
  - f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
  - g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Kabupaten Kampar;
  - h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah;
  - i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;
  - j. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak tidak memperoleh kursi; dan
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi Pendidikan politik dan Pemilihan Umum;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi pendidikan politik dan pemilihan umum di Kabupaten Kampar;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di Kabupaten Kampar;
  - d. Memfasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik masyarakat dan simpatisan partai politik;
  - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk Pemilu / Pilkada di Kabupaten Kampar;
  - f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
  - g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat;
  - h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum, legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada kab/kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Kampar.
  - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten Kampar.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah Kabupaten Kampar.
- d. Fasilitas dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam diwilayah Kabupaten Kampar.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional diwilayah Kabupaten Kampar.
- h. pelaksanaan dan fasilitas komunikasi sosial kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Kampar.
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri diwilayah Kabupaten Kampar.
- j. fasilitas dan koordinasi penanganan kerawanan sosial diwilayah Kabupaten Kampar.
- k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan banga diwilayah Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- l. fasilitas dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa diwilayah Kabupaten Kampar.
- m. fasilitas dan koordinasi penanganan pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme diwilayah Kabupaten Kampar.
- n. fasilitas dan koordiasi penanganan masalah pemerintah dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya diwilayah Kabupaten Kampar.
- o. fasilitas dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah Kabupaten Kampar.
- p. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembiaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan diwilayah Kabupaten Kampar.

Bidang Ketahanan ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarkatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegitan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan failitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan;
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ketahanan ekonomi;
- f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;
- g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- h. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen;
- i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan ; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan, agama dan sosial kemasyarakatan;
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya, agama dan sosial kemasyarakatan;
  - d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada di masyarakat;
  - e. Melakukan dan koordinasi dan kerjasama dengan elemen masyarakat serta dengan Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) di Kabupaten Kampar.
  - f. Melakukan penyiapan, fasilitasi evaluasi dan koordinasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar.
  - g. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Sosial Kemasyarakatan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Kampar.
  - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antara negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik wilayah Kabupaten Kampar.
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Kampar.
  - d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten Kampar.
  - e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Kampar.
  - f. Pegelolaan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Kampar.
  - g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Kampar.
  - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah Kabupaten Kampar.
  - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan setrategik serta perkiraan keadaan di wilayah/kota.
  - j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan terhadap teknologi dan informasi di wilayah Kabupaten Kampar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan dini Masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar.
- l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan pebatasan antara negara di wilayah Kabupaten Kampar.
- m. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah Kabupaten Kampar.
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Kampar.
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Kampar.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan;
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Kampar;
  - c. Peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak sosial baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal;
  - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Kampar;
  - f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
  - g. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja perbatasan; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.
2. Sub Bidang Penanganan Konflik, mempunyai tugas :
    - a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing;
    - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonsiliasi pasca konflik;
    - c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;
    - d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;
    - e. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penyiapan bahan dan rekomendasi serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

## B. Visi dan Misi Kesatuan Bangsa dan Politik Kampar

### 1. Visi

*" Terwujudnya Kampar yang Tentram, Damai dan Demokratis "*

### 2. Misi

- Memperkuat dan memperkokoh persatuan bangsa di Kabupaten Kampar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang sehat dan dinamis
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba terhadap fisik, mental, spiritual menuju masyarakat yang berkualitas

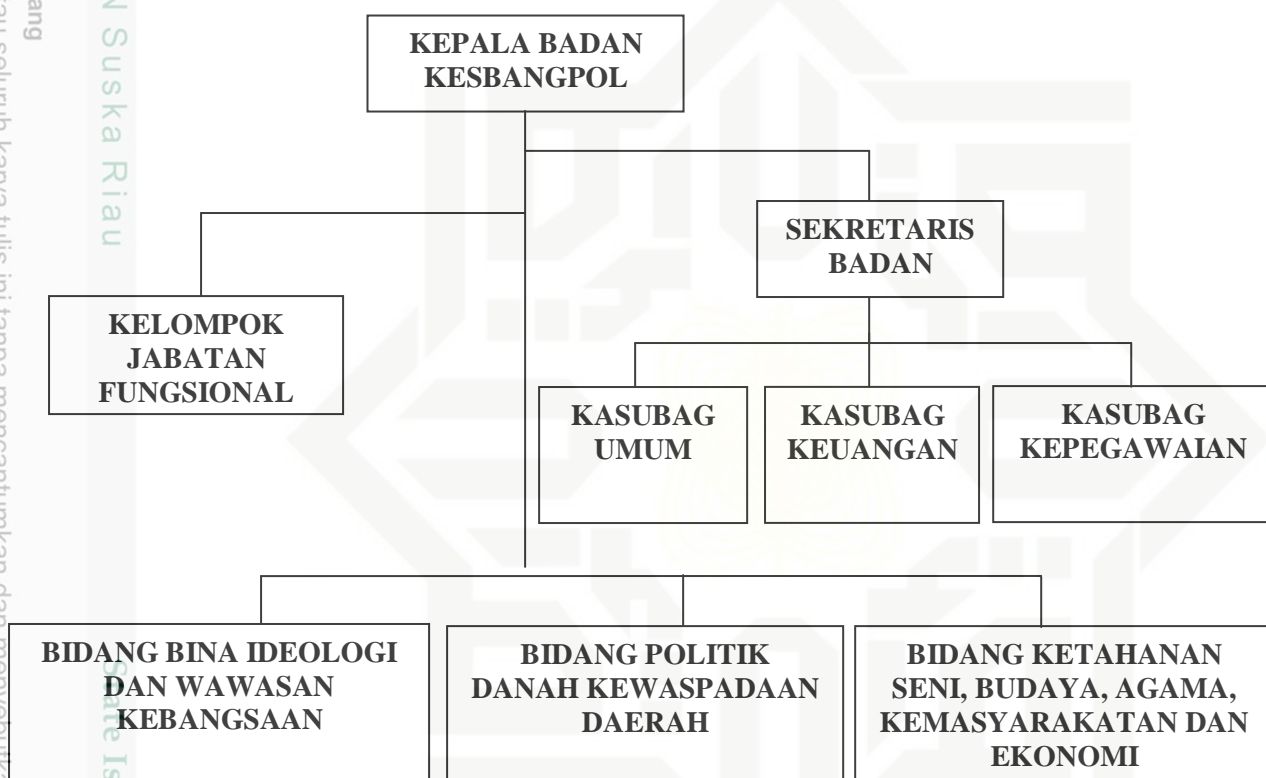


- Mewujudkan hubungan yang harmonis dan berkesinambungan dengan pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan

### C. Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar

Tabel II.1

#### Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Organisasi Kemasyarakatan

##### 1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Istilah organisasi yang berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, defenisinya telah banyak dikemukakan orang. Dimensi manusia, mempertaruhkan bahwa manusia dalam organisasi adalah suatu unsure yang kompleks dan oleh karenanya perlu adanya suatu kebutuhan pemahaman teori yang didukung oleh riset yang empiris sangat diperlukan sebelum diterapkan dalam mengelola manusia itu secara efektif.

Menurut Oliver Sheldon Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efesien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Menurut Chester I. Barnard Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. Menurut Michael J. Jucius istilah organisasi disini dipakai untuk menunjukkan pada suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung ke arah tujuan-tujuan bersama.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 22-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa definisi tentang masyarakat. Mengambil berbagai pendapat, Soekanto (1999) menuliskan sebagai berikut :

Mac Iver & Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa, sebagaimana terungkap dalam ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan seterusnya. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial.<sup>32</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan dalam pasal 1 menjelaskan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

---

<sup>32</sup>Esti Ismawati, *Ilmu sosial budaya dasar*, ( Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm.49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

## 2. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan didalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan, fungsi dan ruang lingkup Organisasi kemasyarakatan adapun tujuan dari Organisasi kemasyarakatan yaitu :<sup>34</sup>

1. Meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan Negara.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

<sup>34</sup> *Ibid*



### 3. Fungsi organisasi kemasyarakatan

Dalam pasal 6 menjelaskan tentang fungsi Organisasi masyarakat yaitu:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial<sup>35</sup>
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau
7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### B. Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

---

<sup>35</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.<sup>36</sup>

Menurut Sri Maulidiah bahwa “Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>37</sup>

Jadi, pemerintah daerah berarti semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan daerah yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada di daerah. Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary*

<sup>36</sup> Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>37</sup> Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Volume III, No. 1, (2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

power) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas bagi lingkungannya sendiri, dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yangm utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.<sup>38</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerahh dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu

<sup>38</sup> Mohamad Yuhdi Batubara, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, No. 1 (2012)

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (2), *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, kewenangan pengelolaan keuangan.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



## 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.<sup>40</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran yang dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas desentralisasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

### a. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Sedangkan pengertian dari Instansi Vertikal, yaitu perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang

<sup>40</sup>Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas dekosentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

b. Asas Desentralisasi

Menurut Koesomahatmaja dalam Koswara adalah peimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan system untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Asas Desentralisasi menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepadadaerah otonom berdasaeakan asas otonomi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan didasarkan pada asas otonomi daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk

---

<sup>41</sup>Pasal 1 angka (9), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

### C. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cretain* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.<sup>42</sup>

Sementara itu, dalam kamus *Dictionary Websters*, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.<sup>43</sup>

Menurut Dahlan Thaib “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Selanjutnya Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan kepada keputusan

<sup>42</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2003). hlm. 98

<sup>43</sup>Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016). hlm. 27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu :

---

<sup>44</sup>*Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pemerintah yang bertanggungjawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara
6. Terdapat berbagai sumber informasi;
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul).
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat).
3. Hak memilih dan dipilih.
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan.
6. Pemilu yang bebas dan adil.
7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya<sup>45</sup> :

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu,

---

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 33

kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.

4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar tidak terlaksana dalam melaporkan kegiatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu di Kesbangpol Kabupaten Kampar adalah diantaranya; (i) Kurangnya Tingkat Kesadaran Organisasi; (ii) serta Kurangnya Sosialisasi oleh Kesbangpol Kabupaten Kampar

#### B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Kampar diharapkan agar memberikan sosialisasi kepada organisasi-organisasi yang ada di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar tentang pentingnya melaporkan kegiatannya, sehingga dengan pelaporan kegiatan ini Kesbangpol Kabupaten Kampar bisa melakukan pembinaan, pengawasan serta pemantauan terhadap organisasi-organisasi tersebut.

2. Organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten kampar harus meningkatkan rasa kesadarannya untuk melaporkan kegiatannya kepada Kesbangpol Kabupaten Kampar, sehingga dengan pelaporan kegiatan ini Kesbangpol Kabupaten Kampar bisa melakukan pembinaan, pengawasan serta pemantauan terhadap organisasi-organisasi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011)
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003).
- Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta : Ombak, 2012)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2016)
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2011)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011)
- Nurul Qamar dan Farah Rezah, *Ilmu Kenegaraan (staatswissenschaft)*, (Jakarta: Sinar Mitra Wacana Media, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2011)
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998),
- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016)

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

## B. Jurnal :

Catur Wibowo dkk, *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, (2015)

Denny Zainuddin, *Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7 No. 1, (2016)

Habib Cahyono, *Peran Mahasiswa Di Masyarakat*, De Banten-Bode, Jurnal Pengabdian Masyarakat Setia budhi, Vol. 1 No. 1,(2019)

I Ganjar Herdiansah, dkk, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, *Sosio global*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, (2016),

Kosasih, *Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, (2016)

Mohammad Mulyadi, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi Vol. 3No. 2, (2012)

Mohamad Yuhdi Batubara, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, No. 1, (2012)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, *Problematisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat*, Mulawarman Law Rev. Volume 4 Issue 1, (2019)

Suroto, *Dinamika Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Memperkuat Karakter Unggul Generasi Muda*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2, (2016)

### C. Peraturan Perundangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR”* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**  
 NIM : 11720715201  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Firdaus, SH., MH**

Sekretaris  
**Rudiadi, SH., MH**

Penguji I  
**Muslim, S. Ag, SH, M. Hum**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalintus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD DAVIN RAYMOND  
 NIM : 11720715201  
 Tempat/Tanggal Lahir : Perawang / 25 Mei 1999  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**M. DAVIN RAYMOND**

**NIM. 11720715201**





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40604  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3094/2021 Tanggal 23 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

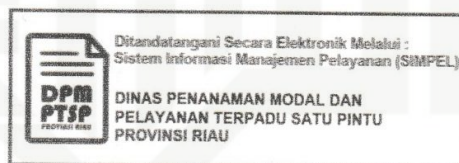
1. Nama : **MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**
2. NIM / KTP : **11720715201**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/320

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40604 tanggal 8 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>MUHAMMAD DAVIN RAYMOND</b>   |
| 2. NIM              | : | 11720715201   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : | BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 April 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**

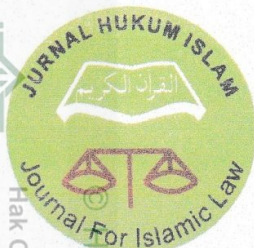
Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMMAD DAVIN RAYMOND  
**NIM** : 11720715201  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul** : PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABUPATEN KAMPAR

**Pembimbing** : Dr. H. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Albi Svahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**MUHAMMAD DAVIN RAYMOND**, Lahir di Perawang, 25 Mei 1999, Anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda, Akmal dan Ibu Husna Yeni. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah SD YPPI Perawang lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP YPPI Perawang, lulus tahun 2014, setelah melanjutkan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tualang, dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Organisasi Oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang tanggal 09 juni 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.42 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).